

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan untuk apotek dan calon apoteker yang akan menjalankan Praktek Kerja Profesi (PKP) Apoteker baik di Apotek Kimia Farma maupun di apotek lain yaitu :

- Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya mempersiapkan diri dengan banyak membaca dan membekali diri dengan ilmu tentang obat-obatan, pelayanan, perundangundangan, dan juga sistem manajemen baik di apotek tempat PKP maupun secara umum sebelum melaksanakan PKP.
- Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya aktif dalam melaksanakan PKP Apoteker, karena sangat banyak pengetahuan dan keterampilan yang tidak diajarkan di perkuliahan dan bisa diperoleh pada saat PKP Apoteker sehingga sangat berguna ketika sudah terjun di dunia kerja.
- Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berperilaku baik selama PKP Apoteker sehingga dapat berinteraksi dengan pegawai apotek lainnya baik apoteker, asisten apoteker, juru racik, maupun pegawai umum.
- Didalam apotek sebaiknya mencantumkan SOP di setiap meja. Misalnya pada meja penerimaan dan penyerahan resep mencantumkan SOP penerimaan resep, skrining apa saja yang harus dilakukan, KIE/PIO apa saja yg perlu diberikan, dll; pada meja racik mencantumkan SOP persiapan meracik, membersihkan alat hingga mengembalikan alat, dll, sehingga pelayanan dapat

dilakukan secara maksimal dan konsisten (tidak ada yang terlewat).

- Didalam apotek perlu disediakan peralatan untuk mempermudah peracikan atau persiapan obat. Misalnya label antibiotik yang berisi perintah kepada pasien untuk menghabiskan obat, tablet counter untuk menghindari kesalahan menghitung tablet dalam jumlah banyak (tablet dengan kemasan botol).
- Pemberiaan KIE kepada pasien lebih diperbaiki lagi yang mana sebaiknya KIE diberikan bukan hanya sekedar memberitahukan tujuan dan cara penggunaan namun perlu adanya penggalian informasi kepada pasien agar dapat mencegah adanya drug related problem dan juga bila perlu pasien diberikan cara terapi non farmakologi, serta hal penting lainnya seperti cara penyimpan, efek samping, serta tanggal kadaluarsa (obat racikan).

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1990, **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek**, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002, **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek**, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Drug Bank, 2018, Open Data Drug & Drug Target Database. Diakses pada 20 Desember 2018, <https://www.drugbank.ca>.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, *Drug Information Handbook* 17th ed., American Pharmacists Association, New York.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standart Kefarmasian di Apotek**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016**

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 889/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek**, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

MIMS, 2018. Diakses pada 20 Desember 2018, <http://www.mims.com/indonesia/drug/info>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, **Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian**, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Presiden, 2012, **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional**, Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, *Manajemen Farmasi : Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*, ed. 3, Airlangga University Press, Surabaya.

Undang-undang Republik Indonesia, 1997, **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**, Undang-undang Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan**, Undang-Undang Republik Indonesia.